



**MINGGU, 19 AGUSTUS 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kades Dilaprkkan *Mark Up* Dana Desa**

**Tak Akan Penuhi Panggilan Jaksa**

**BENTENG** - Kepala Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa dilaporkan atas dugaan markup (pengelembungan, red) realisasi dana desa di sejumlah kegiatan fisik. Diduga mark up sudah terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini.

Sebagaimana dikemukakan Kanedi, warga Desa Padang Betuah kepada **RB**. Disebutkannya kalau sejumlah penyele- wengan itu telah dilaporkan ke Kejari Bengkulu Utara. Diantaranya, tahun 2016 ada pembangunan sumur bor sebanyak 6 titik dengan dana Rp 24 juta per titik.

Disebutkan Kanedi kalau pembua- tan sumur bor tersebut tebang pilih. "Sumur bor dibangun dilahan keluarga

kades saja," terangnya.

Selanjutnya, pembangunan PAUD tahun 2017 yang menghabiskan dana desa mencapai Rp 170 juta yang diduga ada pengelembungan anggaran. Karena anggaran yang digelontorkan tak sesuai dengan hasil fisik bangunan.

Di tahun 2018 diduga juga terjadi pengelembungan dana desa terkait pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) senilai Rp 270 juta. Dimana ukuran bangunan 7x8 meter. Penilaian Kanedi bila dilihat dari ban- gunan yang penyelesaiannya sudah mendekati 95%, tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan.

Ditambah lagi dugaan penyimpangan dana untuk BUMDes senilai Rp 70 juta tahun lalu 2017 yang diduga dipindahkan kepada kegiatan lain yakni pembangunan jembatan beton di

**PAUD.**

Terpisah, Kades Padang Betuah Khalidi dikonfirmasi **RB** terkait tud- ingan Kanedi tersebut secara tegas membantah adanya mark up dana desa. Dijelaskannya seluruh proses pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa diserahkan sepenuhnya kepada Teknik Pelaksana Kegiatan (TPK). "Penghitung rencana pembangunan semuanya TPK yang mengurus," ujar Khalidi.

Terkait sumur bor, Khalidi mengatakan tidak ada kesan tebang pilih. Sumur bor dibuat berdasarkan kebutuhan warga yang mendesak lebih dahulu. Selain itu, semur bor juga bisa digunakan bersama seluruh warga desa. Tidak ada kesan memiliki sendiri meskipun dibangun di atas lahan milik pribadi warga.

Untuk anggaran yang mencapai Rp

24 juta per unit, hal tersebut sudah termasuk meteran listrik baru, tiang untuk penampungan air, tong penampungan air dan sarana lainnya yang meskipun kecil juga mengeluarkan biaya.

Khalidi berharap, kepada pihak yang tidak senang dan melaporkan hal terse- but hendaknya dapat bersama-sama melakukan penghitungan. Apakah sesuai atau tidak harus dibuktikan.

Selain itu, Khalidi mengaku hanya bersifat sebagai Pengguna Anggaran (PA), sementara untuk teknis dan ke- butuhan semuanya diserahkan kepada TPK.

Besok (20/8) dijelaskan kades bahwa dirinya sudah dimintai datang ke Kejari Argamakmur saat dihubungi melalui telepon. Namun kades menyatakan tidak akan datang karena panggilan tersebut tidak dengan surat resmi. (via)